

PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL TERHADAP AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA

Eldis Ramdani dan Neo Agustina

Program studi Akuntansi
STIE Lhokseumawe

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of the implementation of accrual-based government accounting standards on the accountability of financial statements of the North Aceh District Government. The data used in this study are primary data as many as 70 samples with purposive sampling technique. The method used to analyze the independent variables with the dependent variable is a simple linear regression method and a classic assumption test. The results of the study are partial, the application of accrual-based government accounting standards has a significant influence on the accountability of financial statements in the North Aceh District Work Unit.

Keywords: *Application of accrual-based government accounting standards and accountability of financial statements*

A. Latar Belakang Masalah

Pelaporan keuangan dan akuntansi pemerintah merupakan satu bagian dari keseluruhan upaya membangun akuntabilitas pengelolaan keuangan yang berdasarkan pada azas tata kelola yang baik (*good governance*), reformasi bidang keuangan yang dilakukan pemerintah telah membawa perubahan yang besar di bidang akuntansi, karena esensi dari akuntabilitas keuangan negara adalah pertanggungjawaban moral dan pertanggungjawaban konstitusional terhadap rakyat dalam menggunakan uang milik rakyat (Widiarto, 2016).

Melihat perkembangan dari pertanggungjawaban keuangan pemerintah tidak terlepas dari akuntabilitas laporan keuangan pemerintah itu sendiri sehingga semangat reformasi keuangan negara telah menjadi tonggak penting perubahan tata kelola keuangan Negara, reformasi keuangan Negara tersebut merupakan hasil dari keinginan pemerintah dan rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menciptakan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah, yang diformulasikan dalam paket Undang-undang bidang keuangan negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Sesuai dengan amanat UU No.17 Tahun 2003 bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara atau daerah (RAPBN/RAPBD) disusun atau disajikan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan peraturan pemerintah (PP), apabila pengelolaan keuangan daerah tersebut berhasil maka hal itu berdasarkan undang-undang tersebut pemerintah mengeluarkan PP No.24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah (Muchsini, 2010).

Akhirnya Komite Standar Akuntansi Pemerintah telah selesai menyusun Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (SAP) setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Basis Akrual sebagai pedoman dalam penyajian dan pelaporan keuangan bagi pemerintah daerah yang dimulai serentak pada tahun anggaran 2015 dan secara resmi menggantikan PP No.24 Tahun 2005.

Dengan demikian pemerintah daerah sudah memiliki standar yang baik untuk menyajikan dan melaporkan laporan keuangan mereka nantinya. Terbit Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 membawa perubahan besar dari basis kas menuju basis akrual terhadap sistem pelaporan keuangan di Indonesia yang diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan serta menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban sekaligus bermanfaat mengevaluasi kinerja pemerintahan daerah, sehingga akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah benar-benar terealisasi dan nantinya akan berdampak terhadap kredibilitas pemerintahan daerah itu sendiri dan masyarakat juga akan memberikan kepercayaan penuh pada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya (Muchsini, 2010).

Dengan adanya standar dalam pelaporan keuangan merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas dan kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara sehingga lebih terukur dan terstruktur dan dapat dibandingkan, sesuai dengan indikator yang digunakan dalam pelaksanaan *good governance*. Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual diharapkan lebih sistematis menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik lagi sebagai salah satu agenda reformasi keuangan di Indonesia, serta tantangan di era globalisasi sekarang ini yaitu adanya tuntutan Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan adanya Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Aceh Utara bagi pihak internal merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban internal yang dilakukan oleh pengelola keuangan daerah kepada pihak-pihak yang memiliki akses yang lebih mudah yakni, karyawan dan auditor internal. Sedangkan bagi pihak eksternal, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta masyarakat atau pengguna informasi akuntansi yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

Keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Daerah akan meningkat kualitasnya ketika mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari badan pemeriksaan keuangan (BPK) yang setiap tahunnya akan dilakukan penilaian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) berupa opini atau pendapat. Opini atau pendapat adalah merupakan suatu pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran atas informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan didasarkan pada kriteria, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifnya sistem pengendalian intern pemerintah (Darise, 2009).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pelaporan (LAKIP) Pemerintah Aceh Utara di susun sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tanggal 21 April 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Christanty (2016) telah menemukan bukti yang kuat pada biro keuangan setda pemerintahan provinsi jawa timur dimana secara simultan akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Masih relevan dengan hasil yang dicapai melalui implementasi akuntansi berbasis akrual pada pemerintahan kota tomohon dimana standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual peran pemerintah dalam sektor publik dapat mewujudkan pemerintahan yang akuntabel Lamonisi (2016).

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas penulis tertarik melakukan penelitian pada masalah tersebut dengan mengambil judul: "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara".

B. Landasan Teori

1. Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah merupakan sebuah informasi keuangan yang disediakan bagi pemangku kepentingan menurut Halim (2012) adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif berbagai tindakan.

Standar akuntansi pemerintah menurut Peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) No. 64 tahun 2013 yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selanjutnya dalam pasal 1 ayat menyatakan SAP dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintah yaitu SAP diberi judul,

nomor, dan tanggal efektif. Selain itu, SAP juga dilengkapi dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan.

Standar akuntansi pemerintah menurut Mardiasmo (2004) adalah pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan. Terdapat delapan prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan yang digunakan dalam akuntansi pemerintahan, kedelapan prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- **Basis akuntansi**
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal ini peraturan perundangan mewajibkan disajikan laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.
- **Nilai historis**
Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.
- **Realisasi**
Bagi pemerintah pendapatan basis kas yang tersedia telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.
- **Substansi mengungguli bentuk formal**
Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan.
- **Periodisitas**
Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan namun periode bulanan, triwulan, dan semester juga dianjurkan.

- **Konsistensi**
Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan. Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.
- **Pengungkapan lengkap**
Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.
- **Penyajian wajar**
Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

2. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan. Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan pertanggungjawaban tersebut.

Pengertian akuntabilitas menurut Sadjarto (2000) berpendapat bahwa akuntabilitas merupakan salah satu unsur pokok perwujudan *good governance* saat ini sedang diupayakan di Indonesia. Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat menilai apakah pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif. Akuntabilitas dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional dan perspektif sistem akuntabilitas.

3. Tujuan Akuntabilitas

Tujuan akuntabilitas menurut Waluyo (2007) manajemen suatu organisasi harus *accountable* untuk:

- Menentukan tujuan yang tepat.
- Mengembangkan standar yang diperlukan untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan.
- Secara efektif mempromosikan penerapan pemakaian standar.
- Mengembangkan standar organisasi dan operasi secara ekonomis dan efisien.

4. Pengertian Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan pemerintah yang selanjutnya disebut sebagai laporan pertanggungjawaban sebagaimana diungkapkan oleh Fauzia (2014) laporan keuangan adalah suatu bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan entitas sehingga jelas terlihat perbandingannya.

Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana diungkapkan oleh Nordiawan (2006) laporan keuangan adalah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain.

Menurut PP no.71 Tahun 2010 pengertian laporan keuangan adalah laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan yang dimaksud adalah unit pemerintah yang terdiri satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri dari :

- Pemerintah pusat
- Pemerintah daerah
- Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan yang dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

5. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (2004) adalah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang komprehensif, laporan keuangan tersebut merupakan salah satu alat ukur kinerja finansial pemerintah daerah.

Defenisi kualitas menurut mulyana (2010) adalah kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidak sesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan. Kualitas merupakan suatu penilaian terhadap output pusat pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu kegiatan, laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan kepala daerah bertanggungjawab sesuai wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggungjawab mengelola organisasi.

Kualitas laporan keuangan dapat diukur berdasarkan karakteristik sebagaimana diungkapkan Bastian (2009) bahwa kualitas laporan keuangan dapat diukur berdasarkan karakteristik diantaranya dapat dipahami, relevan, materialitas, keandalan, penyajian jujur, substansi mengguguli bentuk, netralitas, pertimbangan sehat, kelengkapan, dan dapat dibandingkan, untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas maka penggunaan sistem informasi manajemen sangat diperlukan untuk mengurangi ketidak telitian dan tingkat kesalahan dalam penyusunan laporan.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Hariadi (2010) adalah ukuran-ukuran normatif yang diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran nomatif yang perlu diwujudkan sebagaimana dinyatakan PP No.71 Tahun 2010 karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat nomatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

C. Metode penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Staf SIMDA Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Utara. Metode penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* method. Menurut Arikunto (2006) *purposive sampling* artinya bahwa penentuan sampel mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu yang telah dibuat terhadap obyek yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini ada kriteria tertentu yang digunakan dalam pengambilan sampel pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Utara yaitu:

- Jenjang pendidikan minimal D3
- Memiliki SK SIMDA
- Berpengalaman mengoperasikan SIMDA minimal 2 (Dua) tahun.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederhana. Pengujian hipotesis digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual secara statistik, dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik t. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (H_0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima.

Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Utara. Hal tersebut disebabkan karena standarisasi atau sistem dibuat untuk meningkatkan kinerja individu dan keseragaman dalam penyajian

laporan keuangan, oleh karena itu ketika hasil (*informasi/output*) dari penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual tersebut memberikan manfaat kepada pengguna karena kesesuaian kebutuhan informasi.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muchsini (2010), dari hasil penelitian secara parsial maupun simultan disimpulkan bahwa adopsi akuntansi berbasis akrual berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas keuangan daerah se Jawa-Bali. Selanjutnya penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Christanti (2016). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara simultan akuntansi basis akrual dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Jawa Barat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Utara dapat disimpulkan bahwa:

- Secara parsial penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Utara.
- Nilai koefisien korelasi (R) variabel penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual memiliki hubungan yang Sedang/ Cukup.

E. Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta: Jakarta
- Albugis, 2016. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sumber daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD Kabupaten Kampar)*. Jurnal
- Faculty of conomics Riau University. JOM Fekon Vol. 4 No. 1. Bastian, Indra, 2009. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga. Jakarta.
- Cristanti, Dianne Natalia, 2016. *Pengaruh akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan, survey pada biro keuangan setda pemerintahan propinsi Jawa Barat*. skripsi FE Universitas Komputer Indonesia.
- Darise, Nurlan, 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Layanan Umum (BLU)*. Edisi 2, Salemba Empat: Jakarta

- Fauzia, 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peneraan Standar Akuntansi Pemerintah dan System Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerinta Daerah*. Jurnal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. 2014,Vol. 2,No.1
- Ghozali, Imam, 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate*. Edisi ke-8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hariadi, Edy, 2010. *Pengaruh Stres Kerja, Motivasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Koperasi (Studi Kasus Pada Koperasi di Kabupaten Buleleng)*. Jurnal. Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Vol.3, No. 1.
- Halim, Abdul, 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jannaini, Yuli, 2014. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Survei pada Dinas Kota Bandung)*, Skripsi, Universitas Komputer Indonesia.
- Lamonisi, Sony, 2016. *Penganggaran Sektor Publik: Pedoman Praktis Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban APBD (Berbasis Kinerja)*. Bayumedia Publishing: Malang
- Mahmudi, 2011. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Muchsini, Binti, 2010. *Pengaruh Adopsi Akuntansi Berbasis Akrual Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Se Jawa-Bali*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas 11 Maret, Surakarta.
- Meta, 2016, *Penggabungan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah: Perkembangan dan Permasalahan*, Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol 2, No 2.
- Mulyana, 2010. *Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Kencana
- Nico Setiawan, 2017. *Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Kencana
- Nordiawan, Deddi, 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 *Tentang Basis Akrual Sebagai Pedoman Dalam Penyajian Dan Pelaporan Keuangan Bagi Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual*.
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2016 *Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh*.

- Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 41 Tahun 2016 *Tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.*
- Simanjuntak, Binsar, 2010. *Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Sektor Pemerintahan di Indonesia.* Makalah ini disampaikan dalam Kongres XI Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta, 9 Desember.
- Sadjiarto, Arja, 2000. *Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan.* *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(1). Jakarta
- Setiawati, 2013. *Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mencegah fraud,* *Jurnal Administrasi Bisnis FISIP Unpar*, Vol 4, No. 1: hal 14-33.
- Stanbury, 2003. *Cash To Accrual Accounting: One Nation's Dilemma.* *International Business & Economics Research Journal*, Vol.9, No.11. Hal 71-78.
- Solihin, Akhmad, 2007. *Penggabungan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah: Perkembangan dan Permasalahan,* *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol 2, No2.
- Sugiyono, 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.
- Tanjung, Abdul Hafiz, 2012. *Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pendekatan Teknis Sesuai PP No. 71/2010.* Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 *Tentang Keuangan Negara.*
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 *Tentang Perbendaharaan Negara.*
- Undang-Undang Nomor 15 *Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.*
- Waluyo, 2007. *Manajemen Publik.* Mandar Maju: Bandung
- Widiarto, 2016. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur).* *Jurnal Akuntansi.* Vol.XI,No.1.
-